

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Di era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-undang yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kuncoro (2002) menjelaskan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi, yaitu (1) dominannya transfer dan pusat, (2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, (3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002: 169).

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233).

Suprpto (2006) melakukan penelitian Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam masa otonomi daerah tahun 2000-2004. Peneliti menggunakan rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi dalam mengukur pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sleman sangat rendah dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi keuangan daerah. Pada rasio efektivitas Kabupaten Sleman menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik, karena setiap tahunnya target pendapatan asli daerah yang ingin dicapai selalu terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan bahkan untuk setiap tahunnya realisasi pendapatan asli daerah yang diterima lebih dari target yang ditetapkan. Sedangkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah semakin proporsional.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki sektor perekonomian yang melimpah dan terus berkembang dengan maraknya pembangunan-pembangunan yang sudah maupun sedang dilaksanakan. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan otonomi daerah yang tidak lepas dari kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Abdul Wachid (2014) melakukan penelitian Kemandirian Keuangan Daerah yakni di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa keuangan Kabupaten/Kota mengalami

peningkatan yang ditunjukkan meningkatnya rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio efektivitas anggaran daerah, dan rasio kemandirian daerah selama tahun 2009-2013. Namun, secara umum sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih memiliki rasio keuangan yang kurang sehat khususnya rasio kemandirian daerah. Hanya Kota Surabaya saja yang relatif tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Penelitian ini menemukan pendapatan asli daerah dan Pengeluaran Daerah berhubungan dengan rasio keuangan daerah. Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo termasuk pada kategori rasio efektivitas anggaran daerah yang paling sakit dengan skala 0.87. Padahal Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi ekonomi cukup besar. Karena selain sebagai penyangga Kota Surabaya, Sidoarjo mempunyai sumberdaya kekayaan yang lebih dari cukup. Kalau dicermati secara mendalam pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan rangking kedua se-Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Namun selama ini pemerintah daerah Sidoarjo belum optimal dalam melaksanakan program pembangunannya bahkan terkait dengan perencanaan serta pengelolaan potensi daerahnya.

Adapun fenomena lainnya yaitu fenomena yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2014 dimana pendapatan asli daerah yang diukur melalui rasio pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terbilang sangat rendah, namun Kemandirian Keuangan Daerahnya cukup tinggi. Seharusnya ketika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah, maka Kemandirian Keuangan Daerah juga akan semakin rendah.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur berdasarkan kemandirian daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul “**Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2016-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2016-2017.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Kemandirian Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 2016-2017 ?
2. Bagaimana Perbandingan Tingkat Kemandirian antara Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 2016-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Tingkat Kemandirian Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
2. Untuk membandingkan Tingkat Kemandirian Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah ilmu pengetahuan yang sangat berguna yaitu berupa pengalaman dan membandingkan antara ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan dilapangan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

3. Bagi akademik

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat dijadikan bahan referensi terhadap penelitian lebih lanjut mengenai Analisis Kemandirian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.